

Efektivitas Pengadaan Barang melalui E-Procurement dengan Metode E-Purchasing di Universitas Pendidikan Ganesha

I Putu Sudiarna, S.P., M.Pd.¹, I Made Yoga Yasa² I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T.³
Desak Ketut Meirawati⁴ Ketut Udy Ariawan, S.T., M.T.⁵

¹ Tenaga Fungsional Ahli Madya Universitas Pendidikan Ganesha

² Tenaga Fungsional Ahli Madya Universitas Pendidikan Ganesha

³ Tenaga Fungsional Ahli Madya Universitas Pendidikan Ganesha

⁴ Dosen Asisten Ahli Universitas Pendidikan Ganesha

⁵ Dosen Lektor Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: putu.sudiarna@undiksha.ac.id, yoga.yasa@undiksha.ac.id, anom.arimbawa@undiksha.ac.id,
ketut.meirawati@undiksha.ac.id, udyariawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Pengadaan barang merupakan program penting baik di instansi pemerintah maupun swasta. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015, pemerintah mengharuskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) dan e-purchasing berbasis e-catalogue. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan dalam mendukung implementasi ini, dengan menyediakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021.

Meskipun kebijakan telah diterapkan, tantangan teknis di lapangan tetap ada. Banyak barang yang secara dokumenter sesuai, namun saat diterima, kondisi barang tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data pengadaan tersedia secara elektronik, realitas di lapangan sering kali berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-kualitatif untuk menganalisis dampak e-procurement terhadap hasil pengadaan barang di Undiksha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 97,9% e-procurement berpengaruh terhadap hasil pengadaan. Namun, hampir 90% pengguna menyerahkan pengadaan kepada pengelola, dan 60% pengelola belum memahami e-purchasing dengan baik. Meskipun demikian, 80% panitia pengadaan telah memahami e-purchasing dengan cukup baik.

Kata kunci: E-Purchasing Undiksha

Abstract

Procurement of goods is an important program in both government and private institutions. According to Presidential Instruction No. 1 of 2015, the government requires the implementation of procurement of goods/services through an Electronic Procurement System (e-procurement) and e-purchasing based on e-catalogues. The National Public Procurement Agency (LKPP) plays a key role in supporting this implementation by providing the Electronic Procurement Service (LPSE) and the Electronic Procurement System (SPSE) in accordance with LKPP Regulation No. 10 of 2021.

Although policies have been implemented, technical challenges on the ground remain. Many goods are in accordance with the documentation, but when received, the condition of the goods does not match the documents. This shows that although procurement data is available electronically, the reality on the ground often differs.

This research uses a quantitative-qualitative approach to analyze the impact of e-procurement on the results of goods procurement at Undiksha. The findings show that 97.9% of e-procurement influences the outcomes of procurement. However, nearly 90% of users delegate procurement tasks

to managers, and 60% of managers do not have a good understanding of e-purchasing. Nonetheless, 80% of the procurement committee members understand e-purchasing fairly well.

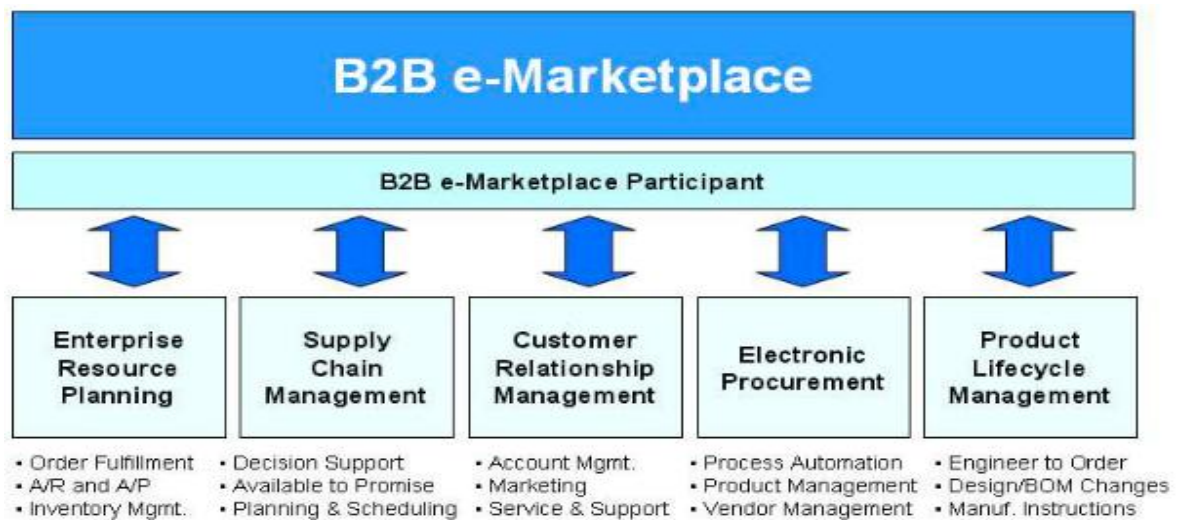
Keywords : *Undiksha E-Purchasing*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sering menghadapi kendala yang memperlambat proses, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Kendala non-teknis mencakup masalah anggaran dan kebijakan internal, sementara masalah teknis sering muncul dalam proses tender atau kesesuaian spesifikasi barang yang tidak tersedia di pasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan aplikasi e-Purchasing atau e-Katalog, yang bertujuan meminimalkan hambatan dalam pengadaan. Aplikasi ini memfasilitasi penyedia barang untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki izin usaha, NPWP, dan memenuhi kriteria teknis untuk memastikan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang (pasal 1 ayat 29) (Presiden RI, 2018). Barang memiliki banyak bentuk, jenis, warna, dan fungsi sehingga setiap orang harus memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya (Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2015). Pada dasarnya, jasa tidak memiliki bentuk fisik namun manfaatnya bisa dirasakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Perbedaan Barang dan Jasa, 2022). Dalam Perpres terbaru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dikenal lagi dengan istilah "Produk" yaitu barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha (Presiden RI, 2021). Isu strategis dalam pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah tertuang dalam (Pusat P3DN, 2016). Definisi e-procurement sesuai dengan (Presiden RI, 2018) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sedangkan dalam (Djokopranoto, 2021) menyebutkan bahwa e-Procurement merupakan sebuah mekanisme pembelian masa kini atau dapat dikatakan sebagai teknik pembelian moderen dimana perusahaan berusaha menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan sejumlah aplikasi dan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) sebagai enabler dalam menjalankan proses terkait. Pembelian secara

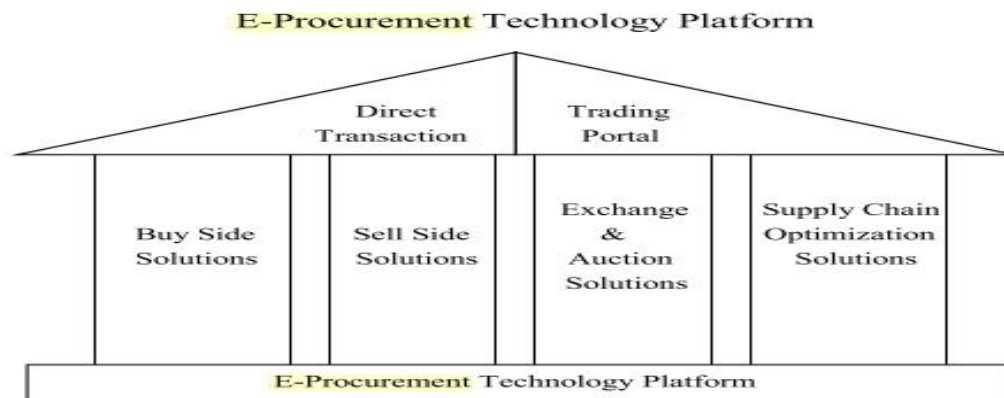
Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (Presiden RI, 2018).



Gambar 1 Market Transaksi B to B
sumber Brien Bries, 2002 dalam (Djokopranoto, 2021)

Menurut (Dr. Mesiono, S.Ag., 2018) menyebutkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan/kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga /instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai. Sedangkan menurut Menurut Gibson (1985: 27-30), dalam jurnal (Yuniningsih & Kharisma, 2014) konsep keefektifan organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi. Dan menurut (Mingkid et al., 2017) menyebutkan Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.

Berikut dapat disampaikan Gambar skema terkait empat golongan yang menjadi pelaku bisnis dalam e-precurement.



Gambar 2 Empat Sektor yang Mempengaruhi E-Procurement sumber Stephens Inc. dalam (Djokopranoto, 2021)

Dalam (Muhaemin, 2019) menyebutkan bahwa Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia sedangkan Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola Kementerian. Menurut (Lestyowati, 2018) kriteria barang/jasa yang ada di Katalog Elektronik yaitu barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, barang/jasa standar atau dapat distandarkan dan merupakan kebutuhan barang/jasa bersifat berulang. Dalam pengadaan menggunakan metode e-purchasing maka kita harus menggunakan e-Catalogue dalam system tersebut, dan berdasarkan (Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, 2015), dibuatkan petunjuk alur pembelian barang secara online menggunakan katalog elektronik. Dalam (Malinda & Hardjomuljadi, 2019) disebutkan e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual dan menganalisisnya secara mendalam. Validitas eksperimen ditekankan untuk memastikan prosedur penelitian tepat. Penelitian dilakukan di Unit Pengadaan/Tim Pokja Undiksha dengan populasi sesuai data yang tersebar di pengguna layanan e-purchasing. Variable yang diujikan adalah E-purchasing: Proses pengadaan barang/jasa berbasis teknologi melalui aplikasi SPSE, Katalog Elektronik: Daftar barang/jasa pada website LKPP, Pejabat Pengadaan: Pihak yang melaksanakan pengadaan langsung/e-purchasing, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): Pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran.

Rancangan penelitian bersifat kualitatif, dengan langkah: identifikasi data yang dibutuhkan, penentuan metode pengumpulan data, perencanaan analisis data. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan instrumen formal dikembangkan setelah masalah ditentukan. Data dikumpulkan melalui wawancara: dilakukan kepada 12 pejabat terkait untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka, observasi: melibatkan pengamatan langsung pada aplikasi e-purchasing dan proses pengadaan barang, dokumentasi: menggunakan dokumen pengadaan, peraturan, dan data LKPP untuk mendukung hasil wawancara dan observasi.

Analisis dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian yaitu sebelum ke lapangan: studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian, selama di lapangan: analisis data interaktif menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. setelah di lapangan: data divisualisasikan secara efisien untuk interpretasi. Prosedur analisa data menggunakan tiga tahapan utama yaitu analisis awal berdasarkan studi pendahuluan yang mengacu kepada teori dan pemahaman peneliti, reduksi dan kategorisasi data selama pengumpulan data yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menyederhanakan, memilah, dan mengelompokkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian dengan cara menyaring data mentah yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan, langkah ini melibatkan pembuangan data yang tidak terkait atau berlebihan agar analisis lebih fokus dan efisien, misalnya, dari transkrip wawancara yang panjang, hanya bagian-bagian yang terkait dengan variabel penelitian yang akan dipertahankan. Sedangkan katagorisasi data adalah langkah setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori yang sesuai. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan tema, konsep, atau variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh: Jika penelitian tentang e-purchasing, maka data dikelompokkan ke dalam kategori seperti efektivitas aplikasi, kendala penggunaan, atau peran pejabat pengadaan. Proses ini bertujuan memudahkan analisis dan interpretasi data, memastikan data yang digunakan berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian, membantu peneliti menemukan pola atau hubungan dalam data yang telah dikategorikan. Dan langkah terakhir dalam prosedur analisa data adalah penyajian data dan penafsiran setelah lapangan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan koordinasi tim peneliti untuk menyamakan persepsi mengenai hipotesis, dilanjutkan dengan konsultasi bersama pembimbing guna menyusun kisi-kisi penelitian yang sesuai dengan tema dan hipotesis.

Selanjutnya, disusun kisi-kisi dan kuesioner dengan menentukan variabel independen, dependen, dimensi, indikator, skala, serta pertanyaan untuk responden. Penelitian ini juga mencakup uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, uji homogenitas varians untuk kelompok data homogen atau tidak, serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Data dikumpulkan melalui angket wawancara dan kuesioner berbasis Google Form yang disusun berdasarkan variabel independen "E-Procurement dengan Metode e-Purchasing" (meliputi dimensi seleksi barang, toko, spesifikasi teknis, dan realisasi pengadaan) serta variabel dependen "Realitas Data Barang Hasil Pengadaan" (meliputi dimensi tampilan fisik, kondisi toko, dan spesifikasi teknis). Kedua variabel menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur respon.

Uji normalitas sebaran data, uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$), sehingga data dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 1 Uji Normalitas

NORMALITY TEST ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6498.556	1	6498.556	638.186	.001 ^b
	Residual	132.377	13	10.183		
	Total	6630.933	14			

a. Dependent Variable: realibilitas pengadaan barang

b. Predictors: (Constant), metode e-purchasing

Uji Homogenitas Varians, berdasarkan uji Levene, nilai signifikansi sebesar 0,079 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa data dianggap homogen.

Tabel 2 Uji Homogenitas Varians

Test of Homogeneity of Variances						
ANOVA						
Realitas Data Barang Hasil Pengadaan melalui E-Procurement dengan Metode e-Purchasing di Universitas Pendidikan Ganesha						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Between Groups	2083.333	1	2083.333	3.312	.079
	Within Groups	17613.867	28	629.067		
	Total	19697.200	29			

Uji Hipotesis dengan Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3 Hipotesis dengan Koefisien Determinasi

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.990 ^a	.980	.979	3.191	.980	638.186	1	13	.001
a. Predictors: (Constant), metode e-purchasing									

Nilai Adjusted R Square sebesar 97,9%, artinya metode e-purchasing memberikan pengaruh 97,9% terhadap realitas pengadaan barang.

Uji Hipotesis dengan Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 4 Hipotesis dengan Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6498.556	1	6498.556	638.186	.001 ^b
	Residual	132.377	13	10.183		
	Total	6630.933	14			
a. Dependent Variable: realibilitas pengadaan barang						
b. Predictors: (Constant), metode e-purchasing						

Nilai signifikansi 0,001 (< 0,05) menunjukkan bahwa variabel X (metode e-purchasing) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (realitas pengadaan barang).

Uji Hipotesis dengan Uji Statistik T (Parametrik)

Tabel 5 Hipotesis dengan Uji Parametrik

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	39.345	3.104		12.678	.001

metode e-purchasing	.769	.030	.990	25.262	.001
---------------------	------	------	------	--------	------

a. Dependent Variable: realibilitas pengadaan barang

Nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa variabel X (metode e-purchasing) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (realitas pengadaan barang).

Pembahasan

Telaah Hasil Penelitian

Berdasarkan Kuisisioner dan dari hasil responden yang dikonversi ke nilai numerik:

- STS (Sangat Tidak Setuju): 5,05%
- TS (Tidak Setuju): 18,71%
- Abstain: 24,52%
- S (Setuju): 30,75%
- SS (Sangat Setuju): 20,97%

Mayoritas responden memahami metode e-purchasing dan mendukung penerapannya dalam pengadaan barang.

Berdasarkan Analisis Data

Normalitas Data: Distribusi data normal dengan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$).

Homogenitas Varians: Data homogen dengan nilai signifikansi 0,079 ($> 0,05$).

Uji Hipotesis:

- Koefisien Determinasi: Metode e-purchasing memengaruhi kinerja pengadaan sebesar 97,9%.
- Uji Korelasi: Variabel X dan Y berkorelasi signifikan (nilai $< 0,05$).
- Uji F Simultan: Signifikansi 0,001 menunjukkan pengaruh simultan metode e-purchasing terhadap realitas pengadaan barang.
- Uji T Parametrik: Signifikansi 0,001 menunjukkan pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan Pengamatan dan Wawancara

- Populasi Pencipta Pengadaan: 70% belum mampu mengelola metode e-purchasing, 90% menyerahkan urusan pengadaan kepada pengelola.

- Populasi Pengelola Pengadaan: 60% belum memahami metode e-purchasing, 40% belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- Populasi Umum: 50% tidak memahami dasar-dasar pengadaan, 70% belum melakukan kegiatan terkait e-purchasing.
- Populasi Panitia/Pokja: 80% telah memahami metode e-purchasing.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi tantangan teknis dan non-teknis yang memperlambat proses, seperti masalah anggaran, kebijakan internal, dan kesesuaian spesifikasi barang di pasaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, LKPP meluncurkan aplikasi e-purchasing berbasis e-katalog, yang mempermudah proses pengadaan melalui sistem elektronik. Penelitian ini, yang dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha, menemukan bahwa metode e-purchasing memiliki pengaruh signifikan terhadap realitas pengadaan barang, dengan kontribusi sebesar 97,9% terhadap efektivitas proses pengadaan.

Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung metode e-purchasing, meskipun ada kendala pemahaman dan implementasi di beberapa kelompok populasi. Data dari uji normalitas, homogenitas varians, dan analisis regresi mengonfirmasi pengaruh positif dan signifikan metode e-purchasing terhadap kinerja pengadaan. Namun, masih diperlukan pelatihan dan pemahaman lebih lanjut bagi pihak terkait untuk meningkatkan implementasi metode ini.

Saran

Metode pengadaan merupakan dasar dalam pelaksanaan pengadaan sehingga perlu diberikan perhatian penuh dalam tindaklanjut setiap proses pengelolaan pengadaan. Kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan pengadaan banyak disebabkan karena ketidaktahuan seseorang dalam mengelola pengadaan sehingga cenderung ceroboh dan menyepelekan pengelolaan pengadaan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap metode pengadaan dalam mengelola pengadaan. Dasar pengadaan yang paling penting adalah peraturan, sedangkan yang paling teknis adalah metode dan instrument dalam pengelolaan pengadaan

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh selama proses penelitian berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada seluruh responden, termasuk Pejabat Pengadaan, PPK, Tim Pokja, dan pengguna layanan e-purchasing, yang telah berkontribusi dengan memberikan data, wawasan, dan pandangan yang sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian ini.

Tidak lupa, kami menghaturkan terima kasih kepada para pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam setiap tahap penelitian, sehingga kami dapat mencapai hasil yang optimal. Semoga penelitian ini memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan metode e-purchasing dan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha maupun institusi lainnya.

Daftar Pustaka

- Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi. (2015). *Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara On-Line* (p. 15). 31 Maret 2015.
- Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2015). *Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pengadaan Barang dengan Pelelangan Itemized* (p. 203). 5 Oktober 2015.
- Djokopranoto, R. E. I. dan R. (2021). *Elektronic Procurement*. In Creative Commons License Deed (pp. 1–145).
- Dr. Mesiono, S.Ag., M. Pd. d. (2018). *EFEKTIVITAS MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH/SEKOLAH PERSPEKTIF ABILITY AND POWER LEADERSHIP* (M. P. Dr. Abdillah, Ed.; Cetakan 1). Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
- Lestyowati, J. (2018). *Analysis of E-Purchasing Problems in the Procurement of Goods and Services for Work Units*. *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 669–695.
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2019). *Faktor Dominan Kendala Penggunaan E-Catalogue Pada Proses Pengadaan Proyek Konstruksi Jalan Dengan Metoda Spss & Rii*. *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.22441/jrs.2018.v07.i2.04>
- Mingkid, J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.
- Muhaemin, E. A. (2019). *Kebijakan Dalam E-Purchasing Dan E-Katalog*. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog- LKPP.
- Perbedaan Barang Dan Jasa (2022).

- Presiden RI. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. In *Perpres 16 th 2018* (Issue 16, p. 90). 22 Maret.
- Presiden RI. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Issue 086130, pp. 1–47).
- Pusat P3DN. (2016). *Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)* (M. Ir. R. Hendro Martono, Ed.; pp. 1–23). Kepala Pusat P3DN.
- Yuniningsih, T., & Kharisma, D. (2014). Pengukuran Kepuasan Suatu Institusi Kesehatan. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 54(7), 283–288.